

Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023

Adam Putra Pratama*), Dzunuwanus Ghulam Manar**), Supratiwi***)
Email : adamputrapratama@students.undip.ac.id

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro,
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 7465407
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Sembako merupakan sebuah program pengembangan dari Program BPNT. Program Sembako dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran 'Keluarga Penerima Manfaat (KPM)' melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, mencukupi gizi seimbang untuk mencegah terjadinya stunting, serta memberikan pilihan serta kendali kepada KPM agar bisa memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, serta administrasi. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli KPM yaitu sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, maupun vitamin serta mineral. Pada penelitian ini Semarang Utara dijadikan lokasi penelitian dalam hal implementasi program bantuan sosial sembako karena, berdasarkan data yang diperoleh dari kecamatan Semarang Utara didapatkan sebuah temuan bahwa wilayah Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang paling banyak mendapatkan jumlah bantuan sosial sembako, maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan bagaimana implementasi program bantuan sosial sembako tersebut yang berjalan di wilayah kecamatan Semarang Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan dimensi Kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bantuan sosial sembako ini jika dilihat dari teori implementasi Ripley dan Franklin belum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, karena walaupun program ini telah berjalan dengan lancar serta cukup berhasil membantu masyarakat serta memenuhi dimensi rutinitas fungsi dan dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, tetapi jika dilihat kembali implementasi program bantuan sosial ini belum memenuhi dimensi kepatuhan yang mana hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako jika dilihat dari teori Ripley dan Franklin maka dapat dikatakan belum berjalan dengan cukup optimal karena masih ada dimensi yang belum terpenuhi. Maka dari itu diperlukan pembenahan serta evaluasi lebih lanjut kedepannya agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini merekomendasikan Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial di Kota Semarang harus lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi yang menjadi salah satu tanggung

jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui program ini. Selain itu, Dinas Sosial Kota Semarang harus ikut aktif dan turut serta membantu dalam mengawasi penyaluran program bantuan sosial ini agar kedepannya tidak ada lagi masalah salah sasaran penyaluran manfaat program bantuan sosial ini, hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi kedepannya.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Sembako, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Program Sembako is a development program of the BPNT Program. Program Sembako has been implemented by the government since 2020, the aim of which is to reduce the expenditure burden on 'Keluarga Penerima Manfaat (KPM)' by fulfilling some of their food needs, providing balanced nutrition to prevent stunting, as well as providing choice and control to KPM so they can meet their food needs, and increase target accuracy, time, quantity, price, quality and administration. The types of food that KPM can buy are sources of carbohydrates, animal and vegetable proteins, as well as vitamins and minerals. In this research, North Semarang was used as a research location in terms of implementing the basic food social assistance program because, based on data obtained from the North Semarang sub-district, it was found that the North Semarang District area was the sub-district that received the most amount of basic food social assistance, therefore this research will focus on how to implement the basic food social assistance program which is running in the North Semarang sub-district area.

This research aims to analyze the Implementation of the Program Sembako Policy in North Semarang District, Semarang City in 2023, using Ripley and Franklin's theory of policy implementation with the dimensions of Compliance, smooth functioning of routines and the realization of the desired performance and impact. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through interviews and documentation.

The results of the research show that the implementation of the Program Sembako assistance program, if seen from Ripley and Franklin's implementation theory, cannot be said to have gone well enough, because even though this program has run smoothly and has been quite successful in helping the community and fulfilling the routine dimensions of function and the dimensions of realizing performance and impact desired, but if we look again at the implementation of this social assistance program, it has not met the dimensions of compliance, which can be concluded that the implementation of the basic food social assistance program, if seen from Ripley and Franklin's theory, can be said to have not run optimally because there are still dimensions that have not been fulfilled. . Therefore, further improvements and evaluation are needed in the future so that this policy can run more optimally.

Therefore, this research recommends that the Semarang City Social Service as one of the implementers of the social assistance program policy in Semarang City should further improve and maximize socialization activities which is one of their responsibilities in implementing this policy, so that more people are aware of the program. This. Apart from that, the Semarang City Social Service must be active and help in supervising the distribution of this social assistance program so that in the future there will be no more problems with the wrong target distribution of the benefits of this social assistance program, this needs to be used as evaluation material in the future.

Keywords: Social Assistance, Program Sembako, Policy Implementation.

PENDAHULUAN

Program Sembako merupakan sebuah program pengembangan dari Program BPNT. Mekanisme yang digunakan pada Program Sembako pada dasarnya terdapat kesamaan dengan program BPNT, di mana tetap menggunakan mekanisme yang sama seperti menggunakan KKS sebagai media pembayaran dan pembelian bantuan tersebut melalui e-Warong. Sehingga jika melihat pada evaluasi tahapan perencanaan (*ex-ante*) yang artinya bahwa kebijakan dilakukan dengan maksud memilih alternatif prioritas dari berbagai alternatif yang telah dirumuskan, maka pada dasarnya bantuan sosial pangan yang dirumuskan oleh pemerintah hanya berfokus pada secara tunai, non tunai, maupun berupa beras. Terlebih lagi jika dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial mengenai bantuan pangan program BPNT dan Program Sembako memiliki jeda waktu yang cukup sebentar yaitu satu tahun. Meskipun dalam pelaksanaannya program BPNT dilaksanakan pada tahun 2017, sedangkan pada Program Sembako dilakukan pada tahun 2020.

Program Sembako dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2020, yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban pengeluaran 'Keluarga Penerima Manfaat (KPM)' melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, mencukupi gizi seimbang untuk mencegah terjadinya stunting, serta memberikan pilihan serta kendali kepada KPM agar bisa memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, serta administrasi. Jenis bahan pangan yang dapat dibeli KPM yaitu sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, maupun vitamin serta mineral. Pada penelitian ini Semarang Utara dijadikan lokasi penelitian dalam hal implementasi

program bantuan sosial sembako karena, Berdasarkan data yang diperoleh dari kecamatan Semarang Utara didapatkan sebuah temuan bahwa wilayah Kecamatan Semarang Utara merupakan kecamatan yang paling banyak mendapatkan jumlah bantuan sosial sembako, yaitu sejumlah 267 penerima dari total 9 kelurahan yang ada pada wilayah kecamatan Semarang Utara, maka dari itu penelitian ini akan memfokuskan bagaimana implementasi program bantuan sosial sembako tersebut yang berjalan di wilayah kecamatan Semarang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023, karena jika dilihat pada kondisi di lapangan masih cukup banyak faktor penghambat dalam optimalisasi berjalannya program bantuan sosial ini, seperti masalah terkait sosialisasi dan ketidaktepatan target penerima bantuan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kasus dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Semarang, pelaksana pendukung dalam Program Sembako, dan masyarakat penerima bantuan Program Sembako. Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin dengan dimensi Kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* sebab dalam pengambilan data nanti akan melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut dapat berupa anggapan bahwa informan terkait telah memenuhi kualifikasi karena menguasai situasi sosial yang akan diteliti. Dimana

dalam menggali informasi terkait implementasi program bantuan sosial, peneliti melakukan wawancara terhadap pejabat terkait dalam instansi Dinas Sosial Kota Semarang, serta terhadap masyarakat penerima program bantuan sosial tersebut.

PEMBAHASAN

Program bantuan sosial sembako ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam hal mengurangi angka kemiskinan dan merupakan bentuk bantuan dan perhatian yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, di Kota Semarang sendiri menurut data yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat dilihat bahwa Kecamatan Semarang Utara merupakan Kecamatan yang paling banyak menerima program bantuan sosial sembako ini yaitu sejumlah 267 penerima, karena merupakan kecamatan dengan penduduk kategori kurang mampu yang paling banyak. dengan adanya bantuan sosial ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Pemberian program bantuan sosial ini telah mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun, dimulai dari program RASTRA, BPNT, sampai saat ini menjadi Program Sembako. Dalam program ini masyarakat diberikan sejumlah uang senilai Rp. 200.000/KPM/bulan, dimana uang tersebut di salurkan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) yang mana bekerjasama dengan HIMBARA yaitu ada Bank BNI yang diterima oleh setiap masyarakat yang terdaftar menerima bantuan tersebut, yang mana kemudian masyarakat dapat membelanjakan uang tersebut di tempat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah yaitu e-warong, yang mana nantinya masyarakat dapat membelanjakan sembako pada tempat tersebut.

A. Dimensi Kepatuhan (Compliance) dalam implementasi program bantuan sosial sembako

Dalam implementasinya, walaupun program bantuan sosial sembako ini dapat sedikit banyak meringankan beban masyarakat miskin, tetapi walaupun demikian masih terdapat beberapa beberapa kendala terkait berjalannya program bantuan sosial ini, kendala tersebut antara lain adalah masih kurang meratanya masyarakat yang menerima program ini, masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait perihal kehadiran program ini yang membuat masyarakat terkadang tidak mengetahui apakah bantuan tersebut sudah cair ataupun belum tiap bulannya. serta masih terdapat kasus ketidaktepatan target penyaluran bantuan sosial tersebut.

Perihal sosialisasi ini dalam Permensos nomor 5 tahun 2021 pada pasal 12 ayat 6 dijelaskan bahwa “melakukan sosialisasi dan edukasi secara tatap muka atau virtual mengenai Program Sembako bersama dinas sosial daerah kabupaten/kota, tenaga pelaksana program sembako, camat, dan perangkat desa/aparatur kelurahan kepada e-warong dan KPM” dari isi peraturan tersebut dapat dilihat seharusnya memang ada sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Tetapi, pada prakteknya dilapangan terdapat perbedaan keterangan antara pihak implementor kebijakan yaitu dinas sosial Kota Semarang dengan masyarakat penerima bantuan sosial. Pihak dinas sosial menjelaskan bahwa rutin melakukan sosialisasi sedangkan masyarakat mengatakan hanya ada sosialisasi 1 kali dan bahkan ada yang memberikan keterangan tidak pernah ada sosialisasi.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa indikator Perilaku dari Implementor pada dimensi kepatuhan masih kurang berjalan

dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak terlaksananya sosialisasi rutin yang harusnya dilakukan oleh dinas terkait untuk masyarakat penerima bantuan sosial. Terdapat juga perbedaan pernyataan dengan kondisi sebenarnya dilapangan dimana pernyataan dari dinas terkait adalah rutin melakukan sosialisasi, tetapi pada kenyataannya masyarakat mengatakan tidak ada sosialisasi rutin yang dilakukan. Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa indikator perilaku dari implementor kebijakan pada dimensi kepatuhan yang dijelaskan Ripley dan Franklin masih belum berjalan dengan baik jika dilihat dari kondisi yang ada dilapangan cukup berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh dinas terkait.

B. Dimensi lancarnya rutinitas fungsi (smoothly functioning routines) dalam implementasi program bantuan sosial sembako

Dalam dimensi lancarnya rutinitas fungsi (smoothly functioning routines) dijelaskan bahwa Tercapainya sebuah implementasi kebijakan ditunjuk dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi. Dalam organisasi rutinitas fungsi sangat berperan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian implementasi program bantuan sosial ini sembako ini, kita dapat melihat dimensi lancarnya rutinitas fungsi dari bagaimana proses penyaluran program bantuan tersebut, mulai dari rutinitas waktu penyaluran bantuan yang dilakukan, jumlah bantuan yang diterima setiap masyarakat tiap kali proses penyaluran bantuan, serta rutinitas sosialisasi ataupun informasi yang diterima masyarakat terkait program tersebut. Selain itu dapat juga dilihat dari bagaimana rutinitas masyarakat dalam menggunakan bantuan tersebut.

Dari keterangan beberapa narasumber selaku penerima program bantuan sosial dapat dilihat bahwa dimensi rutinitas fungsi pada implementasi program bantuan sosial sembako ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya keterlambatan dalam proses pencairan, tidak ada kekurangan pada jumlah bantuan yang diberikan yaitu selalu sesuai dengan kebijakan yang ada, serta sejauh ini tidak ada kendala yang ditemukan masyarakat dalam menggunakan bantuan tersebut, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa rutinitas fungsi yang ada telah berjalan dengan cukup baik pada implementasi program bantuan sosial sembako.

C. Dimensi Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang dikehendaki (Desired Performance In and Impacts) dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Sembako.

Tercapainya atau berhasil tidaknya dari suatu implementasi kebijakan mengacu dan mengarah pada kinerja dan dampak atau manfaat yang dikehendaki dari keseluruhan kebijakan yang ada. Menurut Ripley and Franklin keberhasilan implementasi terbagi atas dua bagian yaitu terwujudnya kinerja kebijakan lebih cenderung untuk pencapaian hasil implementasi dalam waktu yang pendek, sementara terwujudnya dampak kebijakan diartikan sebagai pencapaian hasil implementasi dalam waktu yang panjang.

Dalam kaitannya dengan kebijakan publik, Program Sembako hadir sebagai suatu bentuk yang dibuat oleh

pemerintah yang mana dengan adanya Program Sembako tersebut dapat membantu masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan pokok demi bertahan hidup serta mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan.

Dalam kaitannya dengan implementasi program bantuan sosial sembako ini, dimensi Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang dikehendaki (desired performance in and impacts) berperan sangat penting karena pada dimensi ini dapat dilihat apakah dengan melihat kondisi di lapangan yang demikian, kita dapat melihat apakah implementasi program bantuan sosial sembako ini telah berjalan dengan sesuai dengan target, tujuan, dampak, serta manfaat yang telah dikehendaki pada awal hadirnya kebijakan ini.

Tujuan ataupun manfaat yang dikehendaki dari adanya program ini adalah, program bantuan sosial ini hadir sebagai salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu serta upaya untuk menanggulangi ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin di Kota Semarang khususnya Kecamatan Semarang Utara. Maka dari itu untuk melihat dimensi Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang dikehendaki, peneliti akan melihat kondisi dilapangan apakah dampak yang dikehendaki dari program bantuan sosial tersebut yaitu salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu serta upaya untuk menanggulangi ketersediaan pangan bagi masyarakat miskin, apakah

benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat.

Dengan merasa cukup terbantunya masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki telah berjalan dengan baik. Hal tersebut karena tujuan, manfaat dan dampak yang dikehendaki dari adanya program ini yaitu membantu masyarakat miskin telah tercapai, hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah pernyataan para masyarakat yang menerima program bantuan sosial tersebut dan menjelaskan bahwa mereka merasa cukup terbantu dengan adanya program ini.

Kesimpulan yang dapat diambil dari implemetasi program bantuan sosial sembako jika dilihat dari teori implementasi Ripley dan Franklin adalah, dari ketiga dimensi yang ada yaitu kepatuhan (compliance), lancarnya rutinitas fungsi (smoothly functioning routines) dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (desired performance in and impacts), implementasi program bantuan sosial sembako ini masih dapat dikatakan berjalan cukup baik jika dilihat dari ketiga dimensi yang ada tersebut, walaupun tidak dapat dpungkiri bahwa masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi pada berjalannya implementasi program bantuan sosial sembako tersebut.

Salah satu hal yang perlu dibenahi terdapat pada dimensi kepatuhan (compliance) yaitu, dapat dilihat bahwa indikator Perilaku dari Implementor yang ada pada dimensi

kepatuhan yang masih kurang berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak terlaksananya dengan baik sosialisasi rutin yang harusnya dilakukan oleh dinas terkait untuk masyarakat penerima bantuan sosial. Selain itu, terdapat juga perbedaan pernyataan dengan kondisi yang ada sebenarnya dilapangan dimana pernyataan dari dinas terkait adalah rutin melakukan sosialisasi, tetapi pada kenyataannya dilapangan, masyarakat mengatakan tidak ada sosialisasi rutin yang dilakukan.

Maka dari itu, perlu adanya pembenahan terkait berjalannya dimensi kepatuhan ini dalam implementasi program bantuan sosial dapat berjalan dengan lebih optimal. Walaupun jika dilihat dari dimensi kepatuhan implementasi program bantuan sosial ini masih berjalan kurang baik dari sejumlah sektor, tetapi jika dilihat dari dimensi yang lain pada teori Ripley dan Franklin, program bantuan sosial ini telah berjalan dengan cukup baik. Pada dimensi rutinitas fungsi dalam implementasi program bantuan sosial sembako ini dapat disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya keterlambatan dalam proses pencairan, tidak ada kekurangan pada jumlah bantuan yang diberikan yaitu selalu sesuai dengan kebijakan yang ada, serta sejauh ini tidak ada kendala yang ditemukan masyarakat dalam menggunakan bantuan tersebut, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa rutinitas fungsi yang ada telah berjalan dengan cukup baik pada implementasi program bantuan sosial sembako.

Selain itu, jika dilihat dari dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (desired performance in and impacts), implementasi program jaminan sosial ini dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik, hal tersebut karena tujuan, manfaat dan dampak yang dikehendaki dari adanya program ini yaitu membantu masyarakat miskin telah tercapai, hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah pernyataan para masyarakat yang menerima program bantuan sosial tersebut dan menjelaskan bahwa mereka merasa cukup terbantu dengan adanya program ini.

D. Hambatan Implementasi Program Bantuan Sosial Sembako di Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2023

Berdasarkan hasil analisa pada penjelasan di atas, dapat dikatakan program bantuan sosial sembako ini masih belum berjalan dengan optimal walaupun masyarakat sudah merasakan manfaatnya, masih terdapat beberapa sektor yang perlu di benahi agar program bantuan sosial ini dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya. Pada penelitian ini, penulis juga menemukan beberapa hambatan yang membuat implementasi program bantuan sosial ini masih belum optimal, yaitu:

1. Masih kurangnya sosialisasi oleh implementor kebijakan.
2. Adanya masalah terkait kesalahan target penerima yang disebabkan oleh kurang update atau kurang cocoknya data yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan dinas sosial setempat dengan kondisi

Masyarakat di lapangan yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako di Kota Semarang terutama pada kecamatan Semarang Utara dengan menggunakan teori implementasi Ripley dan Franklin jika dilihat secara keseluruhan dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal atau belum berjalan dengan cukup baik karena belum dapat memenuhi 3 indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Ripley and Franklin. Dalam implementasinya indikator yang sudah berjalan dengan baik hanya dalam aspek lancarnya rutinitas fungsi (smoothly functioning routines) dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki (desired performance in and impacts).

Berhasilnya pada dimensi rutinitas fungsi dalam implementasi program bantuan sosial sembako dapat dilihat dari tidak adanya keterlambatan dalam proses pencairan, tidak ada kekurangan pada jumlah bantuan yang diberikan yaitu selalu sesuai dengan kebijakan yang ada, serta sejauh ini tidak ada kendala yang ditemukan masyarakat dalam menggunakan bantuan tersebut, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa rutinitas fungsi yang ada telah berjalan dengan cukup baik pada implementasi program bantuan sosial sembako.

Selain itu, jika dilihat dari dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, implementasi program jaminan sosial ini dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik, hal tersebut karena tujuan, manfaat dan dampak yang dikehendaki dari adanya program ini yaitu membantu masyarakat miskin telah tercapai, hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah pernyataan para masyarakat yang menerima program bantuan sosial tersebut dan menjelaskan bahwa mereka merasa cukup terbantu dengan adanya program ini.

Namun, dari berjalannya implementasi program bantuan sosial sembako ini, peneliti juga menemukan sejumlah kekurangan yaitu pada dimensi kepatuhan. Pada dimensi kepatuhan ditemukan bahwa salah satu hal yang perlu dibenahi terdapat pada dimensi kepatuhan (compliance) yaitu, dapat dilihat bahwa indikator Perilaku dari Implementor yang ada pada dimensi kepatuhan yang masih kurang berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari belum patuhnya para implementor kebijakan dengan Permensos yang ada seperti belum terlaksananya sosialisasi serta masih adanya masalah terkait ketidaktepatan target penerimaan bansos. Terdapat juga perbedaan pernyataan dengan kondisi yang ada sebenarnya dilapangan dimana pernyataan dari dinas terkait adalah rutin melakukan sosialisasi, tetapi pada kenyataannya dilapangan, masyarakat mengatakan tidak ada sosialisasi rutin yang dilakukan. Selain itu, pada dimensi kepatuhan ini juga ditemukan masih terdapatnya

kasus salah target penerima bantuan sosial yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa para implementor kebijakan masih kurang dapat melakukan pengawasan terkait siapa saja masyarakat yang berhak mendapat bantuan tersebut.

Selain itu, kurang berjalan dengan baiknya indikator kepatuhan dapat dilihat dari ketidakpatuhan dinas sosial Kota Semarang terhadap Permensos Nomor 5 tahun 2021 pasal 15 ayat 8 tertulis, “Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan finalisasi terhadap daftar calon KPM dan melaporkan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial”, pada prakteknya dilapangan kasus ketidaktepatan target masih ditemukan di lapangan hal tersebut karena dinas sosial setempat kurang melakukan finalisasi data dengan baik sehingga masalah ketidaktepatan target tersebut masih ditemukan.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program bantuan sosial sembako ini jika dilihat dari teori implementasi Ripley dan Franklin belum dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, karena walaupun program ini sudah cukup berhasil membantu masyarakat dan dalam dimensi rutinitas fungsi dan dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki telah berjalan dengan baik, namun masih kurang optimal dalam dimensi kepatuhan. Oleh karena itu, karena masih adanya dimensi yang belum terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan sosial sembako masih belum berjalan

dengan optimal sehingga masih diperlukan adanya pembenahan serta evaluasi lebih lanjut agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini.

Saran

1. Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial di Kota Semarang harus lebih meningkatkan dan memaksimalkan lagi kegiatan sosialisasi yang menjadi salah satu tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan ini, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui program ini.
2. Dinas Sosial Kota Semarang selaku salah satu implementor kebijakan program bantuan sosial sembako di Kota Semarang harus ikut aktif dan turut serta membantu dalam mengawasi penyaluran program bantuan sosial ini agar kedepannya tidak ada lagi masalah salah sasaran penyaluran manfaat program bantuan sosial ini, hal tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi kedepannya.
3. Dinas Sosial Kota Semarang harus lebih meningkatkan lagi kualitas finalisasi data penerima bantuan sosial yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menurut permensos, hal tersebut agar masalah terkait ketidaktepatan target dapat lebih diminimalisir.

4. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti dapat menambah atau memperoleh data total seluruh penerima bantuan sosial sembako di Kota Semarang, sebagai data pendukung dalam memperkuat data-data yang telah diperoleh sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Permana . dkk. 2017. *Effect Of Performance-Base Budgeting Good Getting, Internal Control, And Reporting On Performance Accountability Government West Lombok. International Conference And Call For Papers*. Jember
- BPS KOTA SEMARANG. (2020, Juni 12). *LUAS WILAYAH KOTA SEMARANG*. Retrieved from <https://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/4/luas-wilayah-kota-semarang.html>
- BULOG. (n.d.). *Sekilas RASTRA / RASKIN*. Retrieved from <https://www.bulog.co.id/beraspangan/rastra/sekilas-raskin-beras-untuk-rakyat-miskin/>
- Damanik, C. (2015, Agustus 28). *Menteri Sosial Ubah Nama Raskin Jadi Rastra*. Retrieved from <https://regional.kompas.com>.
- Ekonomi Kota Semarang. BPS Statistik, 2022.
- Kementrian Sosial. (2016, April 26). *PEDOMAN UMUM BANTUAN PANGAN NONTUNAI* . Retrieved from <https://www.kemensos.go.id/uploads/topics/15767284433221.pdf>
- Harris, T. (2020). *Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Melalui Lima Hari Sekolah di Kabupaten Gresik (Studi Implementasi Kebijakan PPK Sekolah Menengah Pertama).(Policies for Strengthening Character Education (PPK) Through Five School Days in Gresik Regency (Study of Implementation of PPK Policy for Junior High Schools))* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebujaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta, hlm. 20.
- Kementrian Sosial. (2020, Februari 27). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Retrieved from <https://www.kemensos.go.id/pedoman-umum-program-sembako-2020>
- Mustafida, N. I. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik).
- Nugroho, R. (2012). Public private partnership as a policy dilemma. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 18(3).
- Pedoman Umum Program Sembako. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Jakarta, hlm 3.
- Peraturan Walikota No. 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang
- Purnama, N. A. (2022, Juni 16). *Bansos Tidak Tepat Sasaran Adalah Maladministrasi*. Retrieved from OMBUDSMAN: <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi>
- Riant, N. D. (2006). *Kebijakan Publik; Untuk Negara-Negara Berkembang, Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 2020. *Pedoman Umum Program Sembako*. Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Jakarta, hlm 5.
- Sianturi, R. R., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185-191.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

TNP2K. (2017). *PEDOMAN UMUM SUBSIDI RASTRA* . Retrieved from PEDOMAN UMUM SUBSIDI RASTRA:

https://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Pedoman%20Umum%20Subsidi%20Rastra%202017_Final-1.pdf

Usman & Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 70.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS